

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2023), lebih dari 9,2% populasi global, sekitar 700 juta orang, masih hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan kurang dari \$2,15 per hari. Kemiskinan tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi individu, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan sosial, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Penyebab utama kemiskinan global meliputi konflik bersenjata, ketidakstabilan ekonomi, korupsi, serta perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan (World Bank, 2023).

Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah keterbatasan pokok dalam pilihan dan kesempatan pembangunan manusia untuk menjalani hidup sehat dan produktif, menikmati kebebasan yang memadai, menjaga harga diri, serta memperoleh pengakuan dari orang lain (F. Khaleel, 2016).

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi banyak negara, khususnya di Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, serta beberapa bagian Amerika Latin dan Timur Tengah. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara miskin berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita. Negara-negara tersebut menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi karena kombinasi faktor seperti perang, konflik politik, bencana alam, serta kekurangan infrastruktur dan pendidikan.

Beberapa negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia berdasarkan Persentase Penduduk Miskin & GNI per Kapita menurut Bank Dunia (2023)

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Miskin di dunia

Negara	Persentase Penduduk Miskin	GNI per Kapita (\$USD, 2023)
Burundi	71%	240
Sudan Selatan	64%	700
Mozambik	60%	480
Madagaskar	58%	500
Demokratik Kongo	56%	580
Haiti	55%	760
Yaman	54%	450
Afghanistan	51%	390
Chad	50%	650

Sumber data: Bank Dunia (2023)

Tabel tersebut memperlihatkan negara-negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi di dunia pada tahun 2023. Negara yang menempati posisi teratas antara lain Burundi dengan 71% penduduk miskin dan GNI per kapita sebesar \$240, Sudan Selatan (64% dan \$700), serta Mozambik (60% dan \$480). Negara-negara dalam daftar ini umumnya merupakan negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan struktural dan berbagai tantangan lain seperti konflik berkepanjangan serta keterbatasan infrastruktur. GNI per kapita di negara-negara tersebut sangat rendah, berkisar antara \$240 sampai \$760, menggambarkan kondisi ekonomi yang lemah dan terbatasnya sumber daya untuk pembangunan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi tantangan kemiskinan meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan beberapa negara lain. Menurut data BPS pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi, atau sekitar 25,9 juta orang. Faktor-faktor utama

yang memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia meliputi ketimpangan ekonomi yang tinggi, pengangguran, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari periode sebelumnya, kemiskinan masih menjadi masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan dari berbagai pihak. (BPS, 2023).

Tabel 1.2

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin
Papua	25,15%
Papua Barat	21,43%
Nusa Tenggara Timur (NTT)	19,86%
Aceh	14,45%
Maluku	17,50%

Sumber data: BPS - Statistik Provinsi Indonesia 2023

Kemiskinan di Indonesia tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di beberapa provinsi, termasuk Aceh. Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, Aceh menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Menurut laporan BPS Provinsi Aceh (2023), tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 14,45%, menjadikannya salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian, minimnya investasi industri, serta dampak dari konflik masa lalu yang masih memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi daerah turut berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di Aceh (BPS Aceh, 2023).

Tingkat kemiskinan di Aceh berbeda-beda di setiap kabupaten dan kota, dengan beberapa wilayah menghadapi kondisi yang lebih sulit dibanding wilayah lain. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat

aksesibilitas transportasi dan infrastruktur. Daerah yang memiliki akses transportasi yang baik dan aktivitas ekonomi yang lebih beragam cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah karena masyarakatnya dapat dengan mudah mengakses pasar, layanan pendidikan, dan kesehatan serta peluang kerja yang lebih banyak.

Sebaliknya, wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki akses transportasi yang memadai, serta yang ekonominya sangat bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan, sering menghadapi tantangan yang lebih besar. Sektor-sektor ini rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga hasil pertanian, dan keterbatasan teknologi, sehingga menghambat peluang peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil turut memperburuk kondisi kemiskinan, karena mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Tabel 1.3

Persentase Penduduk Miskin di Aceh

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin		
	2021 Maret	2022 Maret	2023 Maret
Simeulue	18.98	18.37	17.92
Aceh Singkil	20.36	19.18	19.15
Aceh Selatan	13.18	12.43	12.10
Aceh Tenggara	13.41	12.83	12.45
Aceh Timur	14.45	13.91	13.39
Aceh Tengah	15.26	14.50	14.38
Aceh Barat	18.81	17.93	17.86
Aceh Besar	14.05	13.38	13.38
Pidie	19.59	18.79	18.78
Bireuen	13.25	12.51	12.12
Aceh Utara	17.43	16.86	16.64
Aceh Barat Daya	16.34	15.44	15.43
Gayo Lues	19.64	18.87	18.82
Aceh Tamiang	13.34	12.61	12.51

Nagan Raya	18.23	17.38	17.25
Aceh Jaya	13.23	12.51	12.42
Bener Meriah	19.16	18.39	18.31
Pidie Jaya	19.55	18.45	18.40
Banda Aceh	7.61	7.13	7.04
Sabang	15.32	14.66	14.59
Langsa	10.96	10.62	10.53
Lhokseumawe	11.16	10.84	10.73
Subulussalam	17.65	16.94	16.41
Aceh	15.33	14.64	14.45

Sumber data : BPS Provinsi Aceh 2021-2023

Berdasarkan data tersebut, dari 23 kabupaten/kota, Aceh Singkil menempati posisi sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada periode 2021-2023. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya akses modal usaha menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah ini (BPS Aceh, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan, salah satunya menghidupkan kembali Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam. Kedudukan dan fungsi Baitul Mal ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh, yang menyatakan bahwa Baitul Mal adalah lembaga istimewa pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat independen dan berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, serta mengembangkan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta melakukan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam (Qanun Aceh, 2021).

Pemerintah Aceh mengatasi kemiskinan dengan membentuk kembali Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lain. Hal ini ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021, yang menegaskan Baitul Mal sebagai lembaga resmi, independen, dan berwenang penuh mengelola serta mengawasi harta keagamaan sesuai syariat Islam.

Sebagai bagian dari sistem Baitul Mal di Aceh, Baitul Mal Aceh Singkil menjalankan peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021, Baitul Mal Aceh Singkil berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pendistribusi dana zakat, infak, sedekah, serta harta keagamaan lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Keberadaannya menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan ekonomi berbasis syariah.

Baitul Mal Aceh Singkil mengelola dua jenis dana utama yaitu zakat dan infak. Dana tersebut tidak bersumber dari pemerintah, melainkan berasal dari potongan penghasilan para PNS, ASN, PPPK, honorer, kontribusi masyarakat umum, dan beberapa perusahaan. Penghasilan di atas Rp10.500.000 dikenakan zakat sebesar 2,5%, sedangkan penghasilan di bawahnya dikenakan infak sebesar 1%. Dana zakat juga berasal dari potongan proyek pemerintah dengan nilai di atas Rp20 juta sebesar 0,5% pada tahun 2024.

Tabel 1.4
Ketersediaan dana Baitul Mal Aceh singkil

Sumber Dana	Jumlah Dana	Dana Disalurkan
Dana Zakat	Rp 2.298.330.078,91	1.797.180.000
Total dana ZIS	Rp 5.354.679.000.00	Rp 4 miliar kurang lebih, (zakat infak)

Sumber data : komisioner baitul mal aceh singkil 2024

Total dana zakat yang terkumpul pada tahun 2024 mencapai Rp2.298.330.078,91, dan dana zakat yang disalurkan pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp1.797.180.000. Sedangkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp5.354.679.000. Dana zakat disalurkan lebih dari Rp2 miliar, dana infak juga sekitar Rp2 miliar lebih, sisanya digunakan untuk program ke depan.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Singkil dilakukan sesuai ketentuan syariat kepada tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, muafak, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Infak dialokasikan untuk empat program utama, yaitu kemaslahatan umat, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan aset, dan program sosial lainnya seperti pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3), bantuan pertanian, dan rehabilitasi rumah. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, dengan rata-rata bantuan senilai Rp2 juta hingga Rp5 juta. Contohnya adalah bantuan alat untuk perajin tikar, alat tangkap ikan, bantuan becak motor, serta dukungan usaha kecil lainnya. Bantuan diberikan dalam bentuk barang maupun dana, dan sebagian besar disalurkan melalui rekening penerima.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua program bantuan berjalan sesuai harapan. meskipun ada berbagai bantuan yang disalurkan untuk usaha kecil, program

pemberdayaan ekonomi, serta bantuan untuk petani dan perajin, tidak semua bantuan berhasil sepenuhnya. Beberapa usaha kecil yang dibantu, seperti perajin tikar dan kelompok peternakan, berhasil mengurangi beban ekonomi penerima, namun ada juga yang gagal karena keterbatasan dana dan sumber daya. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana, lokasi penerima yang jauh, serta pemotongan anggaran pemerintah yang berpengaruh pada jumlah zakat yang terkumpul dan penerapan sistem rekening untuk bantuan juga menjadi tantangan bagi masyarakat di daerah terpencil. Jumlah penerima manfaat (mustahik) yang tercatat di Baitul Mal Aceh Singkil lebih dari 4.000 orang. Dan ini mencakup 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam pelaksanaan penyaluran, tim verifikasi melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan, termasuk memastikan bahwa barang atau alat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan. Sosialisasi tentang pentingnya zakat juga dilakukan melalui khutbah Jumat dan himbauan dari Badan Musyawarah Gampong. Hal ini penting mengingat kesadaran masyarakat, termasuk muzakki, masih perlu terus ditingkatkan agar partisipasi zakat semakin meluas.

Tabel 1.5
Persentase jumlah Penduduk kecamatan di Aceh singkil

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Gunung Meriah	40.314 jiwa
2.	Simpang Kanan	15.984 jiwa
3.	Singkil	19.994 jiwa
4.	Kuala Baru	10.642 jiwa
5.	Singkohor	2.580 jiwa
6.	Kuta Baharu	7.446 jiwa
7.	Pulau Banyak	9.086 jiwa
8.	Pulau Banyak Barat	4.603 jiwa
9.	Danau Paris	3.104 jiwa
10.	Suro Makmur	6.660 jiwa
11.	Singkil utara	7.971 jiwa

Sumber data : dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil 2024

Kecamatan Gunung Meriah menjadi yang paling banyak menerima bantuan karena memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu sebanyak 40.314 jiwa. Dengan populasi yang lebih besar, jumlah mustahik atau penerima bantuan di kecamatan ini juga lebih banyak, sehingga wajar jika alokasi bantuan lebih banyak disalurkan di daerah ini. (wawancara, 10 Maret 2025)

Berdasarkan hasil temuan wawancara, peneliti tertarik untuk meneliti capaian yang telah dilakukan oleh Baitulmal dengan judul "**Analisis Peran Baitulmal dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana peran Baitul Mal dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh singkil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas yaitu

1. Untuk menganalisis peran Baitul Mal dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Setiap penelitian memiliki manfaat, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Manfaat untuk peneliti

Menambah pemahaman Peneliti tentang bagaimana Baitulmal berperan dalam upaya mengatasi kemiskinan di Aceh Singkil.

1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan pentingnya lembaga Baitulmal sebagai penyedia bantuan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk ikut menyokong Baitulmal dengan zakat, infak, dan sedekah.

1.4.3 Manfaat untuk Akademik

Menambah literatur ilmiah tentang peran Baitulmal dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Aceh Singkil, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa depan.